

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Akuntansi merupakan suatu kegiatan pencatatan dalam bidang penyediaan pengelolaan data kuantitatif yang berfungsi sebagai pengelolaan bersifat keuangan yang bermanfaat untuk memberikan informasi kondisi keuangan dalam menjalankan perekonomian suatu organisasi. Dalam pengelolaan keuangan, organisasi perlu membentuk suatu tatanan keuangan untuk keberlangsungan perekonomian organisasi.

Dengan adanya akuntansi setiap kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi menjadi lebih mudah dan akurat. Dalam pengambilan keputusan akuntansi menjadi patokan untuk menentukan tindakan yang akan di ambil pada masa yang akan datang.

Akuntansi sangat dibutuhkan di setiap kegiatan organisasi, salah satunya Pemerintahan. Pemerintah adalah pelayanan sektor publik dalam pelayanan masyarakat. Dalam menentukan Pemerintah memegang peranan penting dalam menyelenggarakan ketatanegaraan dalam kelangsungan hidup bernegara. Dalam pemerintah telah mengatur pengelolaan keuangan memberikan wewenang disetiap daerah untuk mengatur perekonomiannya sendiri. Akuntansi pemerintahan ini ditujukan untuk pengelolaan keuangan di ruang lingkup pemerintahan. Untuk itu pemerintah memberikan wewenang disetiap daerah untuk mengelola keuangan daerah.

Akuntansi pemerintahan daerah merupakan prinsip untuk mengelola keuangan daerah yang penting dalam pelaksanaan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan yang baik berdampak pada perekonomian dan kelancaran pelaksanaan pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang telah direvisi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pemerintahan, akuntansi bertujuan untuk penyediaan pelayanan dalam masyarakat bukan untuk mencari laba, memberikan informasi transaksi ekonomi dan keuangan dalam pelaksanaan pemerintahan. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) menjadi pengolahan keuangan daerah dalam pengeluaran dan pendapatan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perencanaan kegiatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang disajikan dengan efektif, efisien, transparan, dan bisa dipertanggung jawabkan untuk dituangkan dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Anggaran belanja disusun untuk penganggaran belanja daerah dalam memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akuntansi belanja digunakan untuk pengendalian manajemen dalam pengukuran pengeluaran daerah. Dalam akuntansi belanja bisa dijadikan untuk pengendalian dalam anggaran belanja daerah dan sebagai keputusan dalam mengendalikan fungsi kas.

Maka dari itu, akuntansi belanja sangat penting dalam penganggaran pengeluaran kas daerah agar terkendali dan tersisten sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut, seperti Kantor Bupati Tanah Datar agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan dan perencanaan anggaran yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan bisa dipertanggungjawabkan atas belanja yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang terkait.

Sehubungan dengan hal yang terkait di atas, dalam penganggaran belanja harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka penulis tertarik untuk membahas tentang “PENERAPAN AKUNTANSI BELANJA PADA KANTOR BUPATI TANAH DATAR”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dalam rumusan masalah, masalah yang akan di angkat dalam pembahasan ini, yaitu:

1. Bagaimana Penerapan Akuntansi Belanja dalam penganggaran belanja melalui (LS) di Kantor Bupati Tanah Datar?
2. Apa bukti yang digunakan dalam transaksi Penerapan Akuntansi Belanja melalui (LS) di Kantor Bupati Tanah Datar?

1.3 TUJUAN MAGANG

Dengan adanya kegiatan magang ini, penulis mempunyai tujuan berikut:

1. Untuk mengetahui Penerapan Akuntansi Belanja melalui (LS) di Kantor Bupati Tanah Datar.
2. Untuk Mengetahui bukti-bukti dalam transaksi Penerapan Akuntansi Belanja melalui (LS) di Kantor Bupati Tanah Datar.

1.4 METODE PENELITIAN

Sesuai dengan latar belakang masalah yang akan dibahas pada Kantor Bupati Tanah Datar sebagai tempat praktik kuliah lapangan atau magang dan dengan waktu magang selama 40 (empat puluh) hari kerja yang dimulai tanggal 4 Januari s/d 26 Februari 2021. Penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan dan wawancara.

1.5 SISTIMATIKA PENULISAN

Sistimatika dalam penulisan konten ini yang akan di bahas di setiap bab, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Membahas tentang uraian yang berisi latar belakang rumusan masalah, tujuan metode penelitian dan sistimatika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Membahas tentang teoritis dan konsep yang berhubungan pembahasan yang di ambil tentang “Penerapan Akuntansi Belanja melalui (LS) pada Kantor Bupati Tanah Datar”.

BAB III : Gambaran Umum

Pada bagian ini, menjelaskan tentang profil Kantor Bupati Tanah Datar yang berisi penjelasan mengenai kegiatan di Kantor Bupati Tanah Datar, Visi dan Misi serta menjelaskan sejarah Kantor Bupati Tanah Datar secara umum.

BAB IV : Pembahasan

Bagian ini akan menjelaskan tentang pembahasan yang di ambil dari:

1. Penerapan Akuntansi Belanja melalui (LS) pada Kantor Bupati Tanah Datar.
2. Bukti-bukti yang digunakan dalam transaksi Penerapan Akuntansi Belanja melalui (LS) pada Kantor Bupati Tanah Datar.

BAB V : Penutup

Bab ini, bab terakhir yang akan menjelaskan tentang kesimpulan atas hasil penelitian yang di peroleh dan juga menjelaskan saran dalam penelitian selanjutnya.

